

TESIS
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PEJABAT PEMERINTAH
ATAS KESENGAJAAN TIDAK MELAKUKAN PENGAWASAN
DALAM TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP

CRIMINAL RESPONSIBILITY OF GOVERNMENT OFFICIALS
FOR INTENTIONAL LOSS OF SUPERVISION IN
ENVIRONMENTAL CRIMES



Oleh :
ALAMSYAH
NIM. 2410622040

PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAKARTA
JAKARTA
2026

TESIS
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PEJABAT PEMERINTAH
ATAS KESENGAJAAN TIDAK MELAKUKAN PENGAWASAN
DALAM TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP

CRIMINAL RESPONSIBILITY OF GOVERNMENT OFFICIALS
FOR INTENTIONAL LOSS OF SUPERVISION IN
ENVIRONMENTAL CRIMES



Oleh :

ALAMSYAH

NIM. 2410622040

PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA
JAKARTA
2026

HALAMAN JUDUL

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PEJABAT PEMERINTAH ATAS KESENGAJAAN TIDAK MELAKUKAN PENGAWASAN DALAM TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Magister
Pada Program Studi Hukum Program Magister

Disusun dan diajukan oleh :

ALAMSYAH

NIM. 2410622040

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAKARTA
JAKARTA
2026**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PEJABAT PEMERINTAH ATAS KESENGAJAAN TIDAK MELAKUKAN PENGAWASAN DALAM TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP

Disusun dan diajukan oleh :

ALAMSYAH

NIM. 2410622040

Disetujui Untuk Tahap UJIAN TESIS

Pada Tanggal 5 Juni 2026

Menyetujui

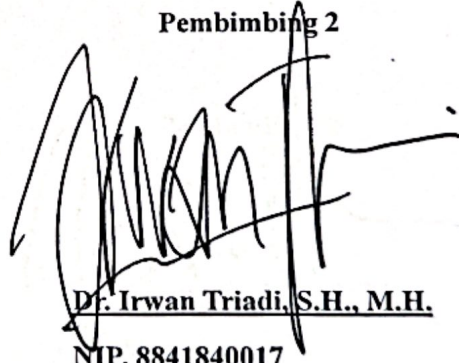
Pembimbing 1



Dr. Slamet Tri Wahyudi, S.H., M.H.

NIP.0027018603

Pembimbing 2



Dr. Irwan Triadi, S.H., M.H.

NIP. 8841840017



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Rumah Sakit Fatmawati, Pondok Labu, Jakarta Selatan 12450
Telepon 021-7656971, Fax 021-7656904
Laman : hukum.upnvj.ac.id, e-mail: fh@upnvj.ac.id

LEMBAR PENGESAHAN TESIS

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PEJABAT PEMERINTAH ATAS
KESENGAJAAN TIDAK MELAKUKAN PENGAWASAN DALAM
TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP**

Disusun dan diajukan oleh:

ALAMSYAH

NIM. 2410622040

Telah diujikan dihadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka
Penyelesaian Studi Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas
Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta
Pada Tanggal 10 Juli 2026
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat Kelulusan

Menyetujui:

Pembimbing 1

Dr. Slamet Tri Wahyudi, S.H., M.H.

NIP. 198601272024061001

Pembimbing 2

Dr. Irwan Triadi, S.H., M.H.

NIDN. 8841840017

Koordinator Program Studi Hukum
Program Magister

Dr. Muhammad Helmi Fahrozi, S.H.I., S.H., M.H.

NIP 198910192025211048



Dekan Fakultas Hukum

Dr. Satherman, S.H., LL.M.

NIP: 197006022021211004

Ditetapkan : Jakarta

Tanggal Ujian : 10 Juli 2026

PERNYATAAN KEASLIAN

NAMA : ALAMSYAH
NIM : 2410622040
PROGRAM STUDI : Magister Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan tesis yang berjudul **"PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PEJABAT PEMERINTAH ATAS KESENGAJAAN TIDAK MELAKUKAN PENGAWASAN DALAM TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP"** adalah benar benar karya saya sendiri. Adapun yang bukan merupakan karya saya dalam penulisan tesis ini diberi tanda citasi dan ditunjukan dalam daftar Pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2021 tentang Integritas Akademik dalam Menghasilkan Karya Ilmiah dan Peratutran Perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta, 10 Juli 2026

Yang membuat Pernyataan,



ALAMSYAH

NIM. 2410622040

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Sebagai civitas akademik Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Alamsyah
NIM : 2410622040
Program Studi : Magister Hukum

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta Hak Bebas Royalti Non eksklusif (*Non-exclusive Royalti Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PEJABAT PEMERINTAH ATAS KESENGAJAAN TIDAK MELAKUKAN PENGAWASAN DALAM TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP”** beserta perangkat yang ada. Dengan Hak Bebas Royalti ini Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta berhak menyimpan, mengalih media/ formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*data base*), merawat dan mempublikasikan Tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.
Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Jakarta, 10 Juli 2026

Yang Membuat Pernyataan,



ALAMSYAH

NIM. 2410622040

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Rabbil‘aalamiin, puji sukur saya panjatkan kepada Allah SWT, karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan tesis ini dengan baik. Penulisan tesis ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada program studi Hukum Bisnis, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta. Saya menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, sangatla sulit bagi saya untuk menyelesaikan karya akhir ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terimakasih kepada:

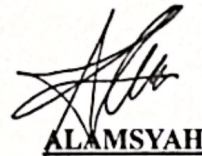
1. Prof. Dr. Anter Venus, MA.Comm, Rektor Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta beserta para Wakil Rektor.
2. Dr. Suherman S.H., LL.M, Dekan Fakultas Hukum sekaligus Pembimbing yang telah memberikan masukan dan sumbangan pemikiran pada saat menyusun penulisan tesis ini.
3. Dr. Slamet Tri Wahyudi, S.H., M.H. selaku Pembimbing Pertama dan Dr. Irwan Triadi, S.H., M.H. Pembimbing kedua yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan, berdiskusi, dan memberikan masukan kepada penulis dalam penyusunan tesis ini.
4. Dr. Handar Subhandi Bakhtiar, S.H., M.H., M.Tr.Adm.Kes. dan Dr. Handoyo Prasetyo, S.H., M.H. selaku Penguji pertama dan Penguji kedua yang telah banyak memberikan masukan dan saran dalam penulisan Tesis ini sehingga membuka cakrawala bagi penulis dalam menyempurnakan penelitian ini menjadi lebih baik.
5. Kedua Orang tua (Mamah Tercinta Erny dan Ibu Mertua Aat Karwati) yang selalu mendukung kegiatan perkuliahan Magister Hukum ini dan selalu mendoakan dimanapun saya berada dalam suka dan duka, berkat doa orang tua inilah membuat saya memiliki semangat yang luar biasa untuk biasa membanggakan mereka.
6. Istri tercinta Nusrat Synthia Riagustiani dan anak tercinta Alzam Ibrahim.H yang selalu bersama memberikan support dan semangatnya dimanapun saya berada dari awal pendaftaran di Universitas Islam Negeri Bandung pada tahun 2023 namun dinyatakan tidak lulus oleh saat proses seleksi, namun beliau tetap

memberikan semangat, sehingga akhirnya saya mendaftarkan diri ke UPNVJ beliau selalu menemani, memberikan motivasi dan selalu menjadi penyejuk hati dikala saya mulai lelah dan terjatuh dari berjuta kesibukan dan permasalahan dalam hidup ini yang membuat saya kuat dan kembali bangkit dari keterpurukan.

7. Sahabat seperjuangan dan seperjalanan “Agung Hermasnyah” yang selalu menjadi tim Hore , tim Suport , tim makan malem , tim ngopi bareng, tim gosip bareng. Agung ini adalah rejeki dari Allah untuk dipertemukan dengan teman yang se-frekuensi di UPNVJ agar bisa menyelesaikan kuliah ini tepat waktu. Dia yang selalu bilang “*Bang kita satu kelompok aja kalau ada tugas*” ini yang membuat saya tenang, karena dibalik itu akan ada agung yang lebih banyak mengerjakan tugas ini dibandingkan dengan saya yang lebih banyak tenggelam dalam pekerjaan sehari-hari.
8. Teman-teman Seangkatan Magister Hukum UPNVJ tahun 2024 yang multi Background, dari Lawyers, Hakim Pajak, Legal Corporate, Jaksa, Dokter Spesialis, yang semuanya akan membuat saya mengenang masa-masa kuliah yang sesingkat ini.

Jakarta, 10 Juli 2026

Penulis



ALAMSYAH

ABSTRAK

ALAMSYAH (2410622040), “Pertanggungjawaban Pidana Pejabat Pemerintah Atas Kesengajaan Tidak Melakukan Pengawasan Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup.” Dibimbing oleh Slamet Tri Wahyud selaku Pembimbing Utama dan Irwan Triadi selaku Pembimbing Pendamping.

Meningkatnya kasus pencemaran dan perusakan lingkungan hidup di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir, seperti kegiatan pertambangan ilegal, pencemaran limbah industri, kebakaran hutan dan lahan, serta kerusakan ekosistem yang menimbulkan kerugian ekologis, ekonomi, dan korban jiwa, menunjukkan bahwa penegakan hukum lingkungan masih menghadapi berbagai kendala. Salah satu faktor yang berkontribusi terhadap kondisi tersebut adalah lemahnya, bahkan adanya kesengajaan, pejabat pemerintah dalam melaksanakan fungsi pengawasan sebagaimana menjadi kewajibannya menurut peraturan perundang-undangan. Namun demikian, pertanggungjawaban pidana terhadap pejabat pemerintah atas pembiaran tersebut masih jarang diterapkan meskipun telah diatur dalam Pasal 112 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan dan hambatan Pasal 112 UUPPLH terhadap pejabat pemerintah yang dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban pengawasan lingkungan hidup, serta merumuskan rekonstruksi norma dan mekanisme penerapannya agar memberikan kepastian hukum dalam penegakan hukum pidana lingkungan di Indonesia. Permasalahan penelitian difokuskan pada efektivitas penerapan Pasal 112 UUPPLH dalam praktik serta formulasi hukum yang ideal untuk mempertegas pertanggungjawaban pidana pejabat pemerintah atas pembiaran terhadap terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan kasus, dan pendekatan perbandingan, yang didukung melalui analisis terhadap beberapa kasus pencemaran dan perusakan lingkungan hidup di Indonesia dalam lima tahun terakhir. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Pasal 112 UUPPLH masih belum efektif karena terdapat kelemahan normatif, kesulitan pembuktian delik omisi, belum adanya parameter yang jelas mengenai bentuk pembiaran dalam pengawasan lingkungan hidup, serta belum tersedianya pedoman yang seragam bagi aparat penegak hukum. Penelitian ini menawarkan rekonstruksi Pasal 112 UUPPLH melalui penegasan bahwa subjek pertanggungjawaban pidana adalah pejabat tertinggi pemberi izin sesuai kewenangannya, penyempurnaan parameter delik omisi dan pertanggungjawaban pidana atas kegagalan pengawasan, serta usulan penyusunan pedoman penerapan Pasal 112 melalui penyempurnaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023. Rekonstruksi tersebut diharapkan mampu mewujudkan penegakan hukum yang lebih efektif, konsisten, memberikan kepastian hukum, serta memperkuat akuntabilitas pejabat pemerintah dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Pejabat Pemerintah, Delik Omisi, Pengawasan Lingkungan Hidup, Penegakan Hukum Lingkungan.

ABSTRACT

ALAMSYAH (241062040), “Criminal Responsibility Of Government Officials For Intentional Loss Of Supervision In Environmental Crimes.”. Supervised by Slamet Tri Wahyudi as the Main Advisor and Irwan Triadi as the Supporting Advisor.

The increasing number of environmental pollution and environmental destruction cases in Indonesia in recent years, including illegal mining activities, industrial waste pollution, forest and land fires, and ecosystem degradation resulting in ecological damage, economic losses, and loss of human lives, demonstrates that environmental law enforcement continues to face significant challenges. One of the contributing factors is the weak implementation, or even the deliberate failure, of government officials to carry out their statutory duty to supervise environmental protection and management. Nevertheless, criminal liability against government officials for such intentional omission has rarely been enforced, despite being regulated under Article 112 of Law Number 32 of 2009 on Environmental Protection and Management. This research aims to analyze the implementation and obstacles in enforcing Article 112 of the Environmental Protection and Management Law (UUPPLH) against government officials who intentionally fail to perform their environmental supervisory duties, as well as to formulate a reconstruction of the legal norm and its implementation mechanism in order to provide greater legal certainty in environmental criminal law enforcement in Indonesia. The study focuses on the effectiveness of Article 112 in practice and on developing an ideal legal formulation to strengthen the criminal liability of government officials for intentionally allowing environmental pollution and/or environmental destruction to occur. This research employs a normative juridical legal research method using statutory, conceptual, case, and comparative approaches, supported by an analysis of several environmental pollution and environmental destruction cases that occurred in Indonesia over the last five years. The findings indicate that the implementation of Article 112 remains ineffective due to normative deficiencies, difficulties in proving omission offenses (delict of omission), the absence of clear legal parameters defining intentional failure to supervise environmental compliance, and the lack of uniform guidelines for law enforcement agencies. This study proposes a reconstruction of Article 112 by emphasizing that the subject of criminal liability should be the highest-ranking licensing authority in accordance with its jurisdiction, strengthening the legal parameters governing omission offenses and criminal liability arising from supervisory failures, and recommending the development of implementation guidelines through the refinement of Supreme Court Regulation Number 1 of 2023. This reconstruction is expected to enhance the effectiveness, consistency, and legal certainty of environmental law enforcement while reinforcing the accountability of government officials in environmental protection and management.

Keywords: Criminal Liability, Government Officials, Omission Offense, Environmental Supervision, Environmental Law Enforcement..

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER TESIS.....	i
HALAMAN SAMPUL TESIS	ii
HALAMAN JUDUL TESIS	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iv
PENGESAHAN TESIS.....	v
PERNYATAAN KEASLIAN	vi
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
ABSTRAK.....	x
ABSTRACT.....	xi
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	10
E. Orisinalitas Penelitian	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Kajian Teoritis	21
1. Teori Pertanggungjawaban Pidana (<i>Criminal Liability Theory</i>).....	22

2. Teori Delik Omisi (<i>Omission / Commission by Omission</i>)	23
3. Teori State Responsibility (Pertanggungjawaban Negara).....	27
4. Teori Penegakan Hukum Lingkungan.....	29
B. Kerangka Fikir	32
C. Definisi Operasional	35

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Tipe dan Pendekatan Penelitian	38
B. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	40
C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	42
D. Analisis Bahan Hukum	42

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bagaimana penerapan dan hambatan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terhadap pejabat pemerintah yang dengan sengaja tidak melakukan pengawasan lingkungan hidup	44
1. Kewajiban Hukum Pengawasan Lingkungan	47
2. Analisis Teori Pertanggungjawaban Pidana terhadap Kelalaian Pejabat Pemerintah dalam Fungsi Pengawasan Lingkungan Hidup.....	54
3. Analisis Teori Delik Omisi Atas Tindakan Tidak Melakukan Pengawasan Lingkungan	56
4. Analisis Berdasarkan Teori <i>State Responsibility</i>	61
5. Penerapan Pertanggungjawaban Pidana Pejabat dalam Pengawasan Lingkungan Hidup di Indonesia.....	64
6. Hambatan dalam Penerapan Pasal 112 UUPPLH dan Kegagalan Konstruksi Delik Omisi dalam Pertanggungjawaban Pidana Pejabat Pengawas Lingkungan.....	67

B. Bagaimana rekonstruksi norma dan penerapan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup guna mempertegas pertanggungjawaban pidana pejabat pemerintah yang secara sengaja tidak melaksanakan kewajiban pengawasan lingkungan hidup	70
1. Urgensi Rekonstruksi Pasal 112 UUPPLH	70
2. Rekonstruksi Pasal 112 UUPPLH Berdasarkan Teori Pertanggungjawaban Pidana.....	74
3. Rekonstruksi Norma UUPPLH Berdasarkan Teori Delik Omisi	79
4. Urgensi Rekonstruksi Pedoman Mahkamah Agung (PERMA) dalam Penerapan Pasal 112 UUPPLH.....	85
5. Studi Kasus Ketiadaan Penerapan Pertanggungjawaban Pidana Pejabat dalam Kasus Lingkungan di Indonesia.....	88
a) Kasus Pencemaran Aliran Sungai Cijayanti Oleh PT Sentul City, Tbk, Penyebab Banjir Besar Bekasi tahun 2025.....	88
b) Kasus Skandal Tambang Timah Bangka Belitung Kasus Korupsi Izin Tambang Timah Rugikan Lingkungan Hingga Rp. 271 Triliun.....	94
c) Kasus Banjir dan Kerusakan Ekologis di Sumatera dan Aceh Tahun 2025 serta Analisis Pertanggungjawaban Pidana Pejabat Pemerintah.....	100

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	104
B. Saran.....	105
DAFTAR PUSTAKA.....	107